

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang laporan keuangan yang menunjukkan bahwa laporan keuangan sebagai bentuk pengelolaan keuangan suatu negara atau daerah dalam jangka waktu tertentu. Kriteria-kriteria untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas yaitu harus relevan, dapat diandalkan, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Untuk meningkatkan transparansi dan tanggung jawab laporan keuangan pemerintah daerah, laporan ini wajib diverifikasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terlebih dahulu. Akuntabilitas yang dituntut oleh masyarakat umum baik pusat maupun daerah dapat tercapai apabila dalam pelaksanaannya, pemerintah menyajikan laporan yang berkualitas, berpedoman pada PSAK yang berlaku, dan menyajikan laporan dengan tepat waktu. Pemerintah daerah harus berupaya meningkatkan akuntabilitas dan tranparansi pengelolaan keuangan daerah melalui penerapan tata kelola laporan keuangan yang baik (Siwambudi et al., 2017).

Laporan keuangan yang berkualitas memberikan peran dalam pengambilan keputusan atau kebijakan di masa depan sebagai satu kesatuan bentuk tata kelola pemerintahan yang baik. Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang dibuat dan ditunjukkan pemerintah daerah setiap tahunnya menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah daerah tersebut. Peraturan BPK RI No. 1 Tahun 2007 mengenai standar

pemeriksaan keuangan negara mengatur bagaimana laporan keuangan yang telah mendapatkan penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) disampaikan dalam wujud opini dan kewajaran (Rizka et al., 2021).

Menurut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Rembang setiap tahun memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Akan tetapi, dalam pencapaiannya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan beberapa permasalahan pada penyajian laporan keuangannya di antaranya pada sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan seperti penanganan pengelolaan sewa pemanfaatan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang di kawasan Taman Rekreasi Pantai Kartini yang belum memadai mengakibatkan kekurangan penerimaan atas pendapatan retribusi sewa ruko sebesar Rp 42,875 juta dan kekurangan penerimaan pendapatan retribusi TRP Kartini sebesar Rp 113,632 juta, pencatatan persediaan yang tidak tertib mengakibatkan laporan persediaan tidak informatif dan selisih atas pengadaan aspal mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp 655,569 juta, dan pertanggungjawaban belanja oleh bendahara pengeluaran dinas lingkungan hidup tidak sah sebesar Rp 362,975 juta. Meskipun pada tahun tersebut Kabupaten Rembang mendapatkan opini WTP, namun BPK tetap menemukan beberapa masalah yang tidak sesuai menurut laporan keuangan (BPK, 2020).

Ada beberapa variabel yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan diantaranya adalah sistem pengendalian intern, kompetensi sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi. Variabel pertama ialah sistem pengendalian intern. Untuk mewujudkan tujuan, semua entitas membutuhkan sistem

pengendalian intern yang berfungsi sebagai pengawas dan pengendali entitas yang terdapat di lingkup pemerintahan khususnya pegawai yang mengelola keuangan agar tidak terjadi kecurangan. Lestari & Dewi, (2020) menjelaskan sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, yang berarti semakin tinggi pengendalian intern, maka semakin tinggi pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Sedangkan penelitian Rizka et al., (2021) didapatkan hasil yang berbeda yaitu sistem pengendalian intern berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan.

Kompetensi sumber daya manusia adalah variabel kedua pada penelitian ini. Dengan sumber daya manusia yang tersedia berkompeten, akan menghemat waktu pada saat penyusunan laporan keuangan karena sumber daya manusianya memahami dan mengetahui terkait tindakan yang harus diambil untuk menyediakan laporan keuangan dengan tepat waktu (Hasanah et al., 2021). Kusumah & Rahayu, (2021) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, yang berarti kualitas laporan keuangan akan lebih baik jika tingkat kompetensi sumber daya manusia lebih tinggi. Berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya Gunawan et al., (2021) yaitu kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Variabel ketiga ialah pemanfaatan teknologi informasi. Perilaku akuntan dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerjanya dan dalam pemanfaatannya untuk kualitas laporan keuangan juga dapat menurunkan kesalahan pencatatan laporan keuangan sehingga

dalam penyusunannya dapat dilakukan secara tepat waktu (Ridzal et al., 2022). Dalam penelitian Binawati, (2022) pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Berbeda dengan hasil penelitian Dewi et al., (2022) yang menyatakan bahwasanya pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan *research gap* seperti yang disebutkan sebelumnya, peneliti tertarik untuk meneliti “Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena diatas, maka permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut diantaranya:

1. Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
2. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
3. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan kesimpulan dari latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Membuktikan secara empiris pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan.

2. Membuktikan secara empiris pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan.
3. Membuktikan secara empiris pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Menurut uraian tujuan penelitian di atas, maka diperoleh manfaat penelitian, sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menguatkan teori *stewardship* mengenai bagaimana hubungan antara variabel sistem pengendalian intern, kompetensi sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Rembang.

2. Secara Praktis

- 1) Bagi ilmu pengetahuan dapat membantu dalam perkembangan ilmu pengetahuan secara keseluruhan.

- 2) Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat dijadikan acuan, petunjuk dan gambaran terhadap pemerintah daerah supaya lebih tegas dalam menentukan kebijakan dan menentukan arah serta penanganan pengelolaan laporan keuangan khususnya pada Pemerintahan Kabupaten Rembang.

- 3) Bagi Peneliti

Diharapkan penelitian ini dapat membantu dalam menambah pengetahuan dan dapat menerapkan teori yang dipelajari di perkuliahan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini disusun membentuk berdasarkan bab-bab yang masing-masing dijelaskan berikut seperti:

BAB I : Pendahuluan

Dalam bagian ini memaparkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika menulis.

BAB II : Landasan Teori

Berisi tentang perumusan hipotesis, kerangka konseptual, tinjauan pustaka, landasan teori, dan penelitian terdahulu.

BAB III: Metode Penelitian

Memberikan penjelasan tentang jenis penelitian, variabel dan definisi operasional, populasi dan sampel, jenis dan sumber data yang dikumpulkan, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V : Penutup

Bagian ini meliputi kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan yang terdapat dalam penelitian dan saran bagi peneliti untuk penelitian berikutnya.